

**DIMENSI PEMBERDAYAAN WILAYAH TERPADU BERBASIS  
ILMU LINGKUNGAN  
(Suatu Kajian Pustaka Pemberdayaan Wilayah di NTT)**

*ENVIRONMENTAL SCIENCE BASED INTEGRATED REGIONAL  
EMPOWERMENT DIMENSION  
(A Literature Review of Regional Empowerment in NTT)*

**Harijono, Asrial dan Paul G. Tamelan**

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FKIP Undana  
E-mail: [harijono69@gmail.com](mailto:harijono69@gmail.com), [asrialchatib@gmail.com](mailto:asrialchatib@gmail.com) dan [pgtamelan@gmail.com](mailto:pgtamelan@gmail.com)

**ABSTRAK**

Ditengah-tengah situasi multidimensi di Indonesia dan perkembangannya paradigma pembangunan dengan tiga spirit yang nuansanya yaitu: *good governance, otonomi daerah dan people empowerment* telah mendorong terjadinya proses reposisi peran dan reorientasi arah kebijakan pemerintah menuju pada pola-pola keterpaduan pembangunan berbasis wilayah. Sebagai sebuah proses, disatu sisi menghadapi banyak tantangan dan disisi lain menciptakan berbagai peluang bagi *stakeholders* pembangunan oleh karena itu pentingnya pengembangan wilayah dari sudut dimensi pemberdayaan masyarakat di wilayah NTT yang terdiri dari pulau-pulau.

**Kata Kunci: Pengembangan Wilayah Terpadu**

**ABSTRACT**

*In the midst of a multidimensional situation in Indonesia and the development of a development paradigm with three spirits, namely: good governance, regional autonomy and people empowerment, it has encouraged a process of repositioning the roles and reorienting the direction of government policies towards integrated regional-based development patterns. As a process, on the one hand it faces many challenges and on the other hand it creates various opportunities for development stakeholders. Therefore, the importance of regional development from the perspective of community empowerment dimensions in the NTT region which consists of islands.*

**Keywords: Integrated Area Development**

**LATAR BELAKANG**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar bagi yang ingin mengetahui suatu dimensi pemberdayaan wilayah terpadu di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan perlu diketahui dan kembangkan bahwa Pembangunan di Indonesia pada masa lalu, sangat diwarnai dengan pola-pola pembangunan yang sentralistis, sebagai konsekuensi dari strategi dan orientasi pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mengesampingkan berbagai aspek penting lain yang seharusnya diperhatikan. Secara umum bahwa sebagian besar wilayah di Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan geografis berada di lereng punggung bukit atau gunung sebesar 1.325 desa/kelurahan 51,96 persen sedangkan pada daerah yang paling

sedikit tempat tinggalnya yaitu di daerah lembah/daerah aliran sungai sekitar 86 desa 3,37 persen (BPS NTT, 2005).

Beberapa aspek dan fenomena kondisional pembangunan, yang pada masa lalu kurang mendapat respon kebijakan nasional yang tepat dan cenderung terabaikan, antara lain **Pertama**, kenyataan situasi dan kondisi antara daerah yang bervariasi (heterogen), direspon dengan kebijakan penyeragaman program dan pola penanganan yang terpusat. **Kedua**, tuntutan aspirasi rakyat diberbagai daerah yang berbeda-beda, direspon dengan kebijakan yang mengedepankan kekuasaan (power) birokrasi. **Ketiga**, kebutuhan partisipasi masyarakat dalam pembangunan direspon dengan kebijakan pengaturan mekanisme perencanaan yang sangat mekanistik berjenjang panjang dari desa ke pusat

(*bottom up and top down planning*) disertai pola pengendalian yang sedemikian ketat. **Keempat**, fungsi kontrol publik dalam penyelenggaraan pembangunan direspon dengan kebijakan yang cenderung menekan dan ancaman tuduhan subversi. **Kelima**, pertanyaan atas keberhasilan dan manfaat pembangunan bagi masyarakat direspon dengan sederetan data statistik dan ketentuan administrative-normatif yang lebih mengedepankan keindahan data daya serap realisasi fisik dan keuangan proyek. **Keenam**, tuntutan pembangunan agar lebih berorientasi kerakyatan dihadapkan pada kebijakan pembangunan yang bernuansa konspiratif yang memihak pengusaha, **Ketujuh**, munculnya berbagai temuan atau pengaduan kasus dalam pelaksanaan pembangunan, direspon dengan kebijakan formalitas yang tak jelas penyelesaian akhirnya. Singkatnya pada masa itu tidak memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan masyarakat yang lebih mengedepankan upaya kemampuan masyarakat memberi tanggung jawab dan keterlibatan masyarakat dalam siklus manajemen penyelenggaraan pembangunan di daerah (Sumarsono, 2002).

Ditengah-tengah masa krisis moneter yang terjadi saat ini akibat imbas dari negara adidaya yang makin kompleks dan kecenderungan mengarah pada situasi krisis multidimensi, maka bergulirlah tuntutan reformasi disegala bidang termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang saat ini masih terus berlangsung. Berbagai tuntutan reformasi yang antara lain pemerintahan yang bersih dan menekan korupsi, otonomi daerah, demokratisasi, keperpihkan pada rakyat yang nyata, supremasi hukum, penanggulangan krisis ekonomi dan lain-lain telah mewarnai wacana dalam tata penyelenggaraan pembangunan pada saat ini.

Paradigma pembangunan telah berubah, dalam pemikiran baru yang pada prinsipnya mengandung tiga spirit yaitu *Spirit good governance* (kepemerintahan yang baik), spirit otonomi daerah dan *spirit people empowerment* (pemberdayaan rakyat / masyarakat).

Dengan konteks pembangunan, ketiga spirit tersebut akan sangat mempengaruhi arah kebijakan dan pola-pola pembangunan saat ini hingga kemungkinan 10-15 tahun mendatang *spirit good governance* menghendaki

kepemerintahan yang baik, lebih transparan, akuntabel, reponsive, partisipatif, bertanggung jawab dll. Spirit otonomi daerah, menghendaki pembagian kewenangan dan dorongan nasional untuk menumbuh kembangkan prakarsa setempat *Spirit people empowerment* menghendaki arah dan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak dan berorientasi pada proses kemampuan, pemberian tanggung jawab dan keterlibatan masyarakat sehingga terciptanya akses bagi masyarakat dan perlindungan atas pemenuhan hak-haknya atau dalam hal ini sosial, ekonomi dan politik dalam pembangunan.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini mengkaji pada pustaka yang relevan dengan judul dan kajian pengembangan wilayah terpadu Propinsi Nusa Tenggara Timur serta pembahasannya menyesuaikan keadaan di lingkungan wilayah tata kota dengan berpedoman sumber-sumber berbasis profil NTT.

## PEMBAHASAN

### A. Pengembangan Wilayah Terpadu

Pembangunan wilayah terpadu, dalam hal ini merupakan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, terencana dan terarah melalui pendekatan keterpaduan yang berbasis wilayah. Wilayah yang dimaksudkan disini adalah sebuah hamparan dengan karakteristik tertentu yang relative homogen. Misalnya sebuah hamparan perbukitan dengan sudut kemiringan tertentu, sebuah wilayah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil, sebuah wilayah yang penduduknya umumnya relative miskin dan sebagainya. Sebagai penegasan dalam pengertian ini wilayah bukanlah batas administrasi. Sebagaimana terminology yang sering diduga dalam administrasi pemerintah (Bambang Supriyanta, 2000).

Dalam konteks manajemen pembangunan daerah, penanganan program - program pembangunan yang menggunakan pendekatan keterpaduan berbasis wilayah ini sering rancu dan digunakan secara keliru dengan apa yang dewasa ini terjadi diberbagai daerah yaitu pemekaran wilayah, yaitu misalnya pemecahan wilayah administrasi pemerintah propinsi / kabupaten / kota, kecamatan.



Gambar Keadaan wilayah NTT yang terdiri dari beberapa pulau (Sumber Profil NTT)

Pengembangan wilayah terpadu, sebagai pendekatan pembangunan daerah, pada prinsipnya merupakan upaya memecahkan masalah tertentu (*problemfocus*) di suatu wilayah yang tertentu pula (*area focus*) secara terpadu. Dengan dua focus tersebut maka akan terpilih sebuah wilayah dimana intervensi pembangunan akan dilakukan yang kemudian disebut dengan wilayah konsentrasi.

Dalam suatu wilayah konsentrasi tentunya ada masyarakat setempat, potensi kelembagaan setempat, sosial budaya setempat dan nilai-nilai *locality* lainnya yang kesemuanya itu harus menjadi basis dari pengembangan wilayah. Sedangkan terpadu dalam konteks ini merupakan keterkaitan fungsional dari aspek lokasi, kegiatan, waktu dan sumber pembiayaan.

Dari pemikiran ini kemudian melahirkan terminology spesifik dalam manajemen pembangunan, yang kemudian dipopulerkan dengan manajemen pengembangan wilayah terpadu, yang maknanya bagaimana menggerakkan berbagai input pembangunan dari berbagai sumber dan menggiringnya secara terpadu ke wilayah konsentrasi yang telah ditetapkan untuk memecahkan masalah tertentu yang telah disepakati bersama.

Input-input pembangunan tersebut bentuknya bermacam-macam yang antara lain berupa: proyek kegiatan pembangunan dari sumber APBN, APBD, *private sectors*, dan masyarakat setempat. Dapat pula berupa tenaga pendampingan misalnya dari LSM, fasilitasi pemerintah kota/kabupaten, regulasi dsb. Termasuk input kegiatan pengabdian masyarakat oleh para mahasiswa, Dengan demikian, koordinasi yang didukung dengan komitmen lintas sektoral, merupakan ciri yang penting dalam proses manajemen pengembangan wilayah terpadu, disamping ciri-ciri lainnya yaitu optimalisasi potensi setempat, desentralistis,

partisipatif, terpadu memiliki problem dan *are focus*, lintas batas administrasi pemerintahan serta dukungan kebijakan yang penuh kearifan lokal (BPS NTT, 2005).

Mengingat permasalahan disparitas antar daerah / wilayah, konflik lintas batas administrasi daerah, kompleksitas masalah yang dihadapi, munculnya permasalahan spesifik wilayah atau wilayah terbelakang, terpencil terbelakang, perbukitan kritis, pesisir, kumuh perkotaan dll. maka sering perkembangan paradigma pembangunan daerah dengan tiga spirit yang menuansanya saat ini (otonomi daerah, *good governance* dan *people empowerment*), maka pengembangan wilayah terpadu sebagai sebuah pendekatan pembangunan menjadi sangat relevan.

Program - program pembangunan berbasis pendekatan pengembangan wilayah terpadu kecenderungan akan didorong melalui kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah (propinsi, kota / kabupaten) dalam rangka keserasian pembangunan terutama upaya memecahkan permasalahan wilayah spesifik, kemiskinan dan mengurangi disparitas antar daerah dalam rangka mewujudkan keserasian pembangunan di kota dan kabupaten (Sumarsono, 2002).

## B. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia ini, maka kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus ditempatkan titik tolak dalam proses pembangunan. Atas dasar pemikiran ini maka dalam siklus manajemen pembangunan peran dan keterlibatan masyarakat harus dapat diformulasikan dan terakomodasi dalam system penyelenggaraan pembangunan. Pandangan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan ada kecenderungan nampak ada pergeseran dengan memposisikannya sebagai subyek pembangunan. Persepi bahwa masyarakat itu bodoh, lemah dan penurut nampaknya memang harus dirubah kearah persepsi yang lebih positif dan kecenderungan inipun mulai nampak dalam berbagai phenomena penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam pembangunan masyarakat itu harus dimampukan ada banarnya mampu bila diberi kesempatan, Masyarakat itu bisa bertanggung jawab, bila diberi tanggung jawab yang jelas. Masyarakat itu tidak bisu melainkan dinamis dan memiliki aspirasi untuk disuarakan bila memang mereka dilibatkan (*involve*) dan terlibat proses pembangunan.

Pengalaman selama ini menunjukkan, masih dijumpai berbagai kekurangan dalam proses pembangunan yang sering menyebabkan terjadinya kegagalan yang pada umumnya karena kurang menmpatkan pemberdayaan masyarakat sebagai aspek penting dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses kemampuan, pemberian tanggung jawab, dan pelibatan masyarakat sehingga mendorong terciptanya akses bagi masyarakat untuk pemenuhan hak-haknya dalam pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, paling tidak ada tiga hak yang menjadi focus orientasi, yaitu hak politik, hak masyarakat untuk akses dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, hak ekonomi, hak masyarakat untuk akses terhadap sumber-sumber pendapatan yang memungkinkan hidup secara layak sesuai kemampuannya. Hak sosial, hak rakyat untuk melakukan interaksi sosial dan membangun organisasi sosialnya sebagai wadah partisipasi masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budayanya.

Untuk ilustrasi beberapa indikasi yang sering terjadi antara lain **Pertama**, tidak adanya kesinambungan pembangunan dimana kegiatan masyarakat akan ikut terhenti manakala masa proyek selesai, **Kedua**, respon masyarakat yang kurang terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tak sesuai dengan kebutuhannya, **Ketiga**, partisipasi dan nilai manfaat yang dirasa kurang karena ketidak jelasan peran dan rasa memiliki masyarakat.

Kondisi di atas sesungguhnya telah didasari, sekalipun masih terbatas di jajaran pemerintah oleh sebab itu dengan momentum reformasi dan perkembangan paradigma pembangun daerah dengan tiga spirit sebagaimana telah dijelaskan maka ada sebuah fenomena baru dimana terjadi proses reposisi peran di jajaran pemerintahan dan proses reorientasi pola pikir maupun pola tindakan dalam mengantisipasi dinamika kehidupan masyarakat dalam masa demokrasi ini.

Sejalan dengan pendapat Sumarsono (2002) bahwa reposisi peran dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat terus dilakukan dalam konteks menciptakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan masyarakat terus dilakukan dalam kontelasi hubungan pusat daerah maupun hubungan pemerintah-rakyat serta hubungan antar *stakeholders* pembangunan lainnya. Sebagai contoh Direktorat Jendral Bina Pembangunan

Daerah, misalnya telah mereposisi peran regulatifnya kearah peran fasilitatif dengan pergeseran filosofi pembinaan dari membangun daerah menuju daerah membangun dan dari membangun masyarakat menuju masyarakat membangun.

Dalam beberapa tahun terakhir ini upaya memujudkan pemikiran di atas dalam pengelolaan pembangunan semakin diperkuat dengan spirit *people empowerment*, dimana rakyat harus diberdayakan agar memiliki kemampuan dan akses yang memungkinkan terlaksananya hak-hak rakyat disamping kewajiban yang menjadi tanggung jawab. Hal ini hanya akan dimungkinkan apabila didukung dengan terciptanya spirit *good governance* atau pemerintahan yang baik di semua level baik di jajaran eksekutif, legeslatif maupun komponen pemerintahan lainnya. Dalam spirit ini, system penyelenggaraan pembangunan harus mendorong proses transparansi dalam pengelolaan pembangunan, mekanisme pertanggung jawaban publik yang jelas, partisipasi *stakeholders* dalam pembangunan yang memungkinkan terjadinya interaksi dan kontrol publik, serta keberpihakannya pada kepentingan rakyat melalui pembangunan yang berbasis rakyat.

### C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah Terpadu

Mengenai Pengembangan Wilayah Terpadu (PWT) dan pemberdayaan masyarakat lebih lanjut dijelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat terpadu dilihat dari dimensi pemberdayaan masyarakat. Beberapa pokok pikiran yang dapat dikembangkan diantaranya adalah; (1) **Pengembangan berbasis pada potensi wilayah setempat**, Pembangunan wilayah terpadu berorientasi pada pengembangan potensi setempat (*resource-based development*) yang memungkinkan untuk digali, diidentifikasi dan dikembangkan melalui proses *value added* dengan teknologi tepat guna yang memungkinkan diadopsi, direplikasi, dan atau dilakukan sebagian atau seluruhnya oleh masyarakat setempat; (2) **Meningkatkan kapasitas kemampuan masyarakat di wilayah setempat**, Pembangunan wilayah terpadu beranggapan bahwa untuk dapat menggali dan pengembangan potensi setempat maka kapasitas kemampuan masyarakat di wilayah setempat harus ditingkatkan melalui pendampingan, pengenalan teknologi tepat guna, pelatihan, akses model usaha dan pasar; (3) **Menumbuh**

**kembangkan lembaga partisipasi masyarakat,** Pembangunan wilayah terpadu mendorong proses penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat, Masyarakat yang teroganisir baik, merupakan masyarakat yang disamping tertib-teratur juga akan lebih kuat dari segi posisi tawarnya dalam menyampaikan aspirasinya. Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya akan efektif apabila disertai dengan penguatan wadah atau kelembagaan dimana para anggota masyarakat dapat saling *sharing* pemikiran dan berinteraksi; (4) **Memberikan tanggung jawab secara proposional pada masyarakat,** Pembangunan wilayah terpadu menekankan pada anggapan bahwa persolan pengembangan wilayah merupakan tanggung jawab bersama (comunitas di luar wilayah maupun komunitas di dalam wilayah konsentrasi) dan karena itu harus ada tanggung jawab tertentu yang diberikan kepada masyarakat di wilayah setempat secara proporsional dengan memperhatikan kapasitas kemampuan masyarakat; (5) **Melibatkan masyarakat dalam siklus manajemen kegiatan pembangunan,** Pembangunan wilayah terpadu melalui sistem pengelolaannya membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat dalam siklus manajemen kegiatan pembangunan wilayah (persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasinya). Dalam proses persiapan harus dilakukan perencanaan masyarakat terlibat menyusun apa yang dibutuhkan (aspirasi) dan dalam monitoring serta membicarakan bersama dalam evaluasi dimana ada wakil-wakil *representatif*, dari masyarakat; (6) **Membuka akses melalui mekanisme interaksi Stakeholders,** Pembangunan wilayah terpadu memandang penting keterlibatan *stakeholders*, paling tidak antara 4 pilar yaitu eksekutif, legeslatif, kelompok mediasi (LSM, Perguruan Tinggi, *Private sectors* dll), dan masyarakat setempat (*grass roots*).

Program - program pembangunan berbasis wilayah dengan spirit pemberdayaan masyarakat yang kuat setidaknya telah mulai dicoba, ditingkatkan dan dikembangkan menjadi pola pembangunan pada era otonomi daerah ini. Model-model yang dikembangkan dalam aplikasinya tentunya berbeda tergantung pada karakteristik wilayah dan tujuannya. Apapun perbedaannya di dalam program-program tersebut sarat akan nuansa pemberdayaan masyarakat. (Syamsul, 2000)

Dalam proses perubahan yang sedemikian cepat pada masa transisi saat ini, dimana paradigma pembangunan mengalami pergeseran yang memberikan implikasi pada arah, kebijakan dan pola pananganannya, memerlukan proses re orientasi menyeluruh dan mendasar para penyelenggara negara, terutama para *stakeholders* pembangunan berbasis wilayah di daerah. Hal ini bukan saja menyangkut perubahan sistem yang mewujudkan dengan sebuah ketentuan perundang-undangan, namun yang lebih mendasar adalah perubahan sikap dan perilaku para penyelenggara pembangunan, pemerintah dan agen-agen pembaharu pembangunan untuk menyesuaikan dengan paranata sosial dan tata nilai yang berada dalam proses perubahan.

Dari dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Sumarsono, (2002) dimana sebuah proses perubahan telah bergerak menuju pada munculnya pilar pembangunan, kekuatan masyarakat yang pada masa lalu terabaikan dan saat ini harus diperhitungkan sebagai kekuatan kunci keberhasilan pembangunan. Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, pembangunan tidak saja dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat, namun simultan dengan itu harus mampu mendorong tumbuh dan berkembang prakarsa lokal, implikasinya, program dan model-model pembangunan di daerah akan sangat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada aspirasi dan prakarsa setempat yang berkembang. Hal ini berarti akan merubah *framework*, para perencana pembangunan wilayah di daerah (kota / kabupaten) untuk lebih melihat, mengajak bicara dan mengakomodasikan secara cermat aspirasi dari suatu komunitas di wilayah setempat sebagai sebuah pilar pembangunan yang perlu diperhitungkan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah terpadu sebagai sebuah *political will* pemerintah pada era reformasi saat ini harus dapat diterjemahkan ke dalam program aksi yang lebih nyata sekalipun dibanyak hal menghadapi berbagai tantangan.

#### **D. Pemberdayaan Berbasis Ilmu Lingkungan**

Pentingnya berbasis ilmu lingkungan dimana menurut Yazid (2017) bahwa partisipasi masyarakat harus ada dalam semua hal, termasuk dalam memelihara kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan mencerminkan kondisi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Pemberdayaan lingkungan merupakan cita-cita bersama sehingga juga harus diciptakan secara bersama-sama pula. Berdayanya lingkungan ditandai dengan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas masyarakatnya, artinya aktivitas masyarakat tidak akan terganggu dikarenakan alasan lingkungannya. Misalnya, dikarenakan lingkungan yang kotor menyebabkan gangguan kesehatan sehingga menghalangi aktivitas masyarakat. Pencemaran lingkungan dan segala permasalahannya dapat diatasi jika semua komponen yang ada mau peduli dan bertanggung jawab. Melalui partisipasi aktif, masyarakat diharapkan mau terlibat secara langsung sehingga akan memberikan kontribusi yang nyata sehingga memberikan pengaruh yang besar. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang berdaya tidak akan terjadi jika partisipasi aktif tidak terbentuk. Partisipasi masyarakat bisa dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap informasi-informasi lingkungan, baik manfaat maupun dampak. Kemudian informasi yang ada semakin diperkuat sehingga menjadi sebuah pengetahuan tentang lingkungan. Selanjutnya, lingkungan bisa direkayasa sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga bisa menjadi pendukung dalam setiap aktivitasnya.

#### KESIMPULAN

Sebagai **kesimpulan**, hasil pembahasan di atas bahwa upaya pembangunan berbasis wilayah yang benar-benar didukung dengan kekuatan masyarakat setempat di NTT sebagai sebuah pilar pembangunan akan tergantung pada seberapa jauh komitmen semua untuk memberdayakan masyarakat dalam sebuah tatanan sistem politik Indonesia yang demokratis, dimana kekuatan masyarakat menjadi bagian pilar pembangunan penentu keberhasilan dan **disarankan**, bahwa sebagai konsekwensinya upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan wilayah tertentu terpadu, dari dimensi pemberdayaan masyarakat harus dilihat

sebagai sebuah tanggung jawab bersama di wilayah NTT ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Hari Wibisono, 1996, *Perencanaan Kota Komprehensif* (Pengantar dan Penjelasan), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Bambang Supriyanta, 2000, Kualitas Lingkungan Pemukiman dan Lokasi Perumahan. *Jurnal Teknologi Kejuruan dan Pengajaran FPTK IKIP Malang*
- BPS NTT, 2005, *Potensi Desa Nusa Tenggara Timur*, Badan Pusat Stataistik Nusa Tenggara Timur, Kupang
- BPS NTT, 2002, *Hasil Pengolahan Data dan Analisis Potensi Desa Nusa Tenggara Timur*, Badan Pusat Stataistik Nusa Tenggara Timur, Kupang
- DPU, 2005, *Kebijakan Nasional, Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan*, Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta
- Yazid Yasril, 2017, Pemberdayaan Masyarakat berbasis Lingkungan, *Jurnal Dakwah Risalah*, Volume 28, Nomor 1, halaman.10 - 14
- Syamsul, 2000, Teknologi Desa Sebagai Satu Usaha Pembangunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, *Jurnal FPTK, IKIP Malang*
- Sumarsono, 2002, *Dimensi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah*, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Universitas Muhammadiyah, Jakarta
- Suryadi, C. 2006. *Program Kota Sehat di Indonesia Sebagai Bagian dari Pembangunan Kota yang Berkelanjutan* (Tinjauan Kritis). Staf Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unika Atma Jaya), Jakarta